



<https://doi.org/10.56552/jisipol.v6i1.186>

Analisis Kinerja Instansi Pemerintahan Di Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau

¹⁾ Sri Ambar Rinah, ²⁾ Neng Suryanti Nengsih, ³⁾ Desrian Effendi, ⁴⁾ Dwiniati

^{1), 3), 4)} Administrasi Publik STISIPOL Raja Haji

Tanjungpinang

²⁾ Ilmu Pemerintahan, STISIPOL Raja Haji, Tanjungpinang

Email: sriambarrinahok@gmail.com

Abstract

A weak reporting system will have an impact on the reports made by the LAKIP team. There is still a budget that has not been fully realized, indicating a weak reporting system.

The aim of this research is to analyze the performance of government agencies in the DPRD Secretariat of Riau Islands Province. This type of research is descriptive with a qualitative approach. Data collection was carried out using observation techniques, interviews and documentary studies. The data analysis used in this research is a qualitative descriptive data analysis technique. Based on the research results, it is known that the performance of government agencies in the Riau Islands Province DPRD Secretariat Office is still not optimal. So far, the Riau Islands Province DPRD secretariat has managed a website to provide open information that is easily accessible to the public, but the content of the website is very limited, information is still very minimal, some information cannot be accessed, then there is another website that is used, namely <https://ppid.kepriprov.go.id/public/information> but also very limited. The suggestion that can be made is that there is a need to increase the openness of information that is easily accessible to the public. There is a need to improve performance in seeing the needs of the public or society.

Keywords: *Analysis, Performance, Government Agencies*

Abstrak

Sistem pelaporan yang lemah akan berdampak pada laporan-laporan yang telah dibuat oleh tim LAKIP. Masih adanya anggaran yang belum sepenuhnya terealisasi menunjukkan lemahnya system pelaporan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Kinerja instansi Pemerintahan di Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan Teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentatif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deksriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Kinerja Instansi Pemerintahan Di Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau masih belum optimal. Selama ini sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau mengelola website untuk memberikan keterbukaan informasi yang mudah di akses oleh masyarakat namun isi dari website sangat terbatas, informasi masih sangat minim, beberapa informasi tidak bisa diakses, kemudian ada web lain yang digunakan yaitu <https://ppid.kepriprov.go.id/informasipublik> namun juga sangat terbatas. Saran yang dapat disampaikan adalah perlu adanya peningkatan keterbukaan informasi yang mudah di akses oleh masyarakat. Perlu adanya peningkatan kinerja dalam melihat kebutuhan publik atau masyarakat.

Kata kunci: *Analisis, Kinerja, Instansi Pemerintahan, DPRD Provinsi Kepri*



PENDAHULUAN

Pembangunan aparatur pemerintah daerah merupakan suatu bagian yang sangat penting sehingga tidak bisa terpisah dari adanya pembangunan daerah yang bertujuan untuk mencapai tujuan yaitu masyarakat yang adil, makmur. Sejahtera, dan bermatabat yang ditegaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Keberhasilan pembangunan daerah tidak mungkin bisa terwujud tanpa bantuan pemerintah daerah yang masing-masingnya memiliki tugas untuk memajukan pembangunan daerah dan memiliki kapasitas dalam tugasnya yaitu transparan, profesional dan akuntabel. Agar akuntabilitas kinerja berjalan dengan sesuai aturan, maka setiap pemerintah daerah harus menampilkan segala fungsinya dan tugas pokoknya agar bisa terjadi sinkronisasi antara perencanaan yang sangat ideal untuk direncanakan dengan keluaran dan manfaat yang dihasilkan.

Untuk itu diperlukan instrument yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggaraan pemerintah disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP disusun berdasarkan Peraturan Presiden 29 Tahun 2014 tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian ditindaklanjuti dengan PERMENPAN 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang di percayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategi yang ditetapkan, dan juga wajib disampaikan ke Gubernur/Bupati/Walikota paling lambat februari atau dua bulan setelah masa tahun anggaran berakhir.

Rendahnya kompetensi aparatur PEMDA akan menyebabkan rendahnya tingkat akuntabilitas kinerja, selanjutnya akan meningkatkan resiko berinvestasi dan mengurangi kemampuan untuk berkompetisi serta melakukan efesiensi (susilatri, 2015)

Kinerja pemerintah didefenisikan sebagai hasil dari kegiatan dan program pemerintah yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan pengguna anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Kinerja pemerintah tidak bisa dilihat dari sisi input dan output tetapi juga dari sisi outcome, manfaat dan dampaknya terhadap masyarakat.

Disamping penilaian terhadap kinerja, pemerintah juga harus mempertanggungjawabkan kinerja yang telah dicapainya. Kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan



pelaksanaan program atau kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan disebut akuntabilitas kinerja (BPKP, 2009)

LAKIP merupakan indikator yang dipergunakan untuk memperlihatkan apakah kinerja instansi pemerintahan sudah baik. Oleh karena itu, sangat penting bagi instansi pemerintah untuk terus meningkatkan manajemen kinerjanya, untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitasnya, meskipun masih belum diketahui sejauh mana keberhasilan instansi tersebut dalam mencapai hasil yang diharapkan. Peningkatan kinerja tidak dapat dipisahkan dari evaluasi terhadap sistem yang sedang berjalan. (Mundung, 2023)

Dalam melakukan evaluasi kinerja membutuhkan sasaran kinerja dan tujuan kinerja untuk bisa menciptakan sasaran strategi yang sudah ditentukan bersama, pengalaman kerja yang harus dimanfaatkan untuk bisa membantu program-program kegiatan agar bisa mencapai realisasi yang ditetapkan di awal. Pegawai dituntut untuk bisa melaksanakan kinerja yang sesuai dengan kapasitasnya, dalam laporan kinerja instansi pemerintah sudah dirangkum sedemikian rupa untuk disampaikan kepada gubernur untuk di evaluasi dan juga diperiksa apakah sudah berjalan dengan baik ataupun belum.

Sebagaimana beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas, penelitian yang dilakukan ini berbeda, penelitian ini akan focus pada kinerja instansi Pemerintahan di Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Dimana dalam instansi Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau dilihat dari laporan kinerja program yang ditetapkan oleh sekretariat ini ada beberapa program yang belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Kondisi ini sangat penting dan sangat memerlukan pengendalian internal yang cukup baik agar semua program yang ada bisa terealisasi, dalam hal ini sangat penting untuk bisa menambah pagu ditahun berikutnya. Untuk melakukan pertanggungjawaban yang sudah ditetapkan semestinya dilakukan evaluasi kinerja untuk para pegawai disana, menjunjung nilai kejujuran dan juga nilai rasa bertanggungjawab.

Menurut fenomena yang ada, masih ada anggaran yang belum sepenuhnya terealisasi hal ini karena lemahnya pelaporan yang akurat untuk membuat suatu laporan yang akan dilihat realisasinya. Sistem pelaporan yang lemah akan berdampak kepada laporan-laporan yang telah dibuat oleh tim LAKIP. Guna dari sistem pelaporan ini untuk mengetahui apakah penyusunan dari LAKIP tersebut bisa berjalan dengan baik dan juga untuk mengoraksi apakah masih ada kesalahan dalam penyusunan.



Tabel. 1
Realisasi Anggaran Berdasarkan Program Kegiatan

No	Program	Pagu Anggaran Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	%
1	Program Pelayana n Administrasi Perkantoran	2.204.490.000	2.085.715.96 2	94,16
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4.057.142.500	3.947.456.58 3	97,30
3	Penigkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	95.565.000	45.282.500	47,38
4	Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	214.330.000	212.795.895	99,28
5	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	1.508.006.000	1.216.494.87 7	80,6
6	Perencanaan Pembangunan Daerah	111.890.000	111.881.300	100
7	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5.200.000.000	4.997.217.62 9	96,10
8	Peningkatan Publikasi Komunikasi, dan Informasi	450.000.000	354.831.800	78,85

Sumber : Buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2023

Pada tahun 2023 dilihat capaian kinerja menurun, diketahui untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur hanya tercapai 47,38 % tidak sampai 50 persen kemudian Peningkatan Publikasi Komunikasi, dan Informasi hanya 78,85 % dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah hanya terealisasi 80,6 % fenomena yang terjadi dikarenakan penggunaan anggaran tidak memperhitungkan dengan matang kegiatan dan dana yang dilaksanakan, kemudian masih ada kegiatan yang belum terealisasi dan juga masih terdapat pergeseran anggaran yang diawalnya sudah ditetapkan. Sebagai Sekretariat mempunyai peran masing-masing melaksanakan konsisten itu seperti pelaksanaan kinerja pelayanan dan akan ada



perjanjian kinerja Sekretariat DPRD terhadap Gubernur. Peran yang dimaksud adalah pelayanan staf kepada Anggota DPRD yang dihitung dari satu tahun dan akan dibandingkan hasil pelayanan tersebut, apakah memuaskan atau tidak. Dengan latar belakang tersebut, maka peneliti merasa sanga penting melakukan penelitian tentang analisa kinerja instansi Pemerintahan di Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Dimana tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa kinerja instansi Pemerintahan di Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau.

KAJIAN PUSTAKA

Kinerja

Menurut Mulyadi (2007; 337) kinerja organisasi adalah keberhasilan personel, tim atau organisasi dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya dengan perilaku yang diharapkan. Kinerja (performance) adalah kemampuan untuk pencapaian tugas organisasi dengan menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien. Sumber daya yang dimaksudkan meliputi sumber daya manusia, seluruh kekayaan, kapabilitas, proses organisasi, atribut perusahaan, informasi serta pengetahuan yang dikendalikan perusahaan. Kinerja didefinisikan sebagai gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan, program serta kebijakan dengan menggunakan sejumlah sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Sembiring 2012:81). Berdasarkan beberapa pendapat tersebut mengindikasikan bahwa untuk mencapai hasil kerja organisasi yang maksimal adalah dengan mengelola serta memanfaatkan sumber daya organisasi secara baik.

Menurut Sony Yuwono, dkk (2005: 36) Indikator kinerja kegiatan. Indikator kinerja kegiatan adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan yang dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan atau program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan input. Misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.
- b. Keluaran (*output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.
- c. Hasil (*outcomes*) segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
- d. Manfaat (*benefit*) adalah kegunaan suatu keluaran (output) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang diakses oleh



publik.

- e. Dampak (*impact*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai dari capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

Bertitik tolak dari pendapat-pendapat yang dikemukakan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja pada hakekatnya adalah suatu kondisi yang menunjukkan adanya tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsi yang telah dirumuskan secara jelas dan tegas, agar setiap individu dapat menjalankan peranan dan kewajibannya selaras dengan visi, misi serta tujuan dari organisasi dimana mereka bekerja.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dimana teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data deskriptif kualitatif karena data yang dikumpulkan dilakukan analisa dan kemudian dipaparkan secara deskriptif (uraian). Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Bungin (2012:70) sebagai berikut :

2. Reduksi Data Dari lokasi penelitian, data lapangan dituangkan dalam uraian laporan yang lengkap dan terinci.
3. Penyajian Data Penyajian data (display data) dimasukkan agar lebih mempermudah bagi peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian- bagian tertentu dari data penelitian.
4. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi Pada penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Masukan (*input*)

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dianalisa bahwa sudah adanya sumber daya manusia atau pegawai yang memahami tugas pokok dan fungsi yang diberikan, dilihat dari minimnya kesalahan yang diberikan, para pegawai saling membantu dan mau saling belajar satu sama lain sehingga tidak ada pekerjaan



yang tidak dapat di selesaikan. Di sekretariat daerah DPRD Provinsi sudah menyediakan peralatan kerja yang memadai, peralatan teknologi khususnya yang dapat membantu pegawai dalam bekerja. Peranan aparatur negara tersebut menjadi semakin strategis sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dewasa ini. Dalam pemerintahan, kemajuan TIK diadopsi untuk menunjang kinerja pemerintahan melalui program e-Government (e-Gov).

2. **Keluaran (output)**

Berdasarkan hasil penelitian, maka diketahui bahwa untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh sekretariat DPRD sudah baik, ada beberapa kegiatan sudah berjalan, yang dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2
Indikator dalam pelayanan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan sekretariat DPRD	68	68	100
Persentase pelayanan pelaksanaan sidang dan risalah DPRD sesuai SOP	94	100	106,38
Persentase pelayanan humas dan keprotokolan DPRD sesuai SOP	94	100	106,38

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau, 2023

Jika dilihat bahwa kegiatan yang dilakukan selama berjalan sesuai dengan tugas yang diberikan, dimana mulai dari urusan DPRD sampai dengan pelayanan kepada masyarakat sudah berjalan, seperti melayani dan menerima tamu DPRD, menyiapkan alat kelengkapan DPRD, menerima dan menyampaikan aspirasi masyarakat, menerima dan melayani masyarakat yang membutuhkan informasi. Berdasarkan hasil wawancara maka diketahui bahwa target dan realisasi kegiatan selama ini sudah berjalan, artinya, kegiatan dilakukan sudah sesuai dengan rencana strategi yang sudah di susun. Kemudian dari hasil observasi ditemukan bahwa ada kegiatan yang sudah di susun dalam rencana kerja. Hal ini dapat dilihat dari tabel



berikut:

Tabel 3
Perjanjian kinerja Sekertariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau.

Sasaran strategi	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Meningkatnya pelayanan sekretariat DPRD dan pelayanan anggota DPRD	Indeks kepuasan pelayanan terhadap pelayanan sekretariat daerah	Skor	68
	Persentase pelaksanaan sidang dan risalah DPRD sesuai SOP	Persentase	94 %
	Persentase pelayanan human dan keprotokolan DPRD sesuai SOP	Persentase	94 %
Meningkatnya pelayanan administrasi dan keuangan DPRD sesuai dengan SOP	Persentase Pelayanan Administrasi keuangan DPRD sesuai SOP	Persentase	94 %
Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana anggota DPRD	Persentase kecukupan sarana prasarana anggota DPRD	Persentase	94 %

Sumber: Sekertariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau, 2023



Tabel 3
Pencaapaian kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau.

Sasaran strategi	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Meningkatnya pelayanan sekretariat DPRD dan pelayanan anggota DPRD	Indeks kepuasan pelayanan terhadap Pelayanan sekretariat daerah	68	68
	Persentase Pelayanan pelaksanaan sidang dan risalah DPRD sesuai SOP	94 %	100 %
	Persentase pelayanan human dan keprotokolan DPRD sesuai SOP	94 %	100 %
Meningkatnya pelayanan administrasi dan keuangan DPRD sesuai dengan SOP	Persentase Pelayanan Administrasi keuangan DPRD sesuai SOP	94 %	100 %
Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana anggota DPRD	Persentase kecukupan sarana prasarana anggota DPRD	94 %	96,58 %

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau, 2023



Jika dilihat semua kegiatan sudah sesuai dengan rencana, bahkan realisasi dalam rencana kegiatan melewati batas target yang telah ditentukan, Penilaian kinerja bagi apatur berguna untuk menilai kuantitas, kualitas dan efektivitas pelayanan, motivasi dan penyesuaian anggaran organisasi.

3. Hasil (*outcomes*)

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dianalisa bahwa hasil kerja dapat dirasakan oleh masyarakat, adanya kemudahan masyarakat mencari informasi, sekertariat selalu memberikan informasi secara transparan dan terbuka. Hasil kerja ini juga dapat dilihat dari akuntabilitas dalam bekerja. Berikut capaian indeks kepuasan terhadap pelayanan di DPRD. Berdasarkan hasil observasi dan data yang di dapatkan maka diketahui bahwa pelayanan sudah baik dan terus meningkat.

4. Manfaat (*benefit*)

Berdasarkan hasil penelitian, maka diketahui bahwa selama ini pihak sekertariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau mengelola website untuk memberikan keterbukaan informasi yang mudah di akses oleh masyarakat, yang dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 1
Website DPRD Provinsi Kepulauan Riau



Jika dilihat ada website, <https://dprd.kepriprov.go.id/> dimana jika dilihat harusnya informasi yang diberikan sudah bisa diperoleh oleh masyarakat karena sudah disajikan namun kenyataannya, isi dari website sangat terbatas, bahkan bagian informasi kosong, sebagai berikut

Gambar 2

Isi Informasi Website DPRD Provinsi Kepulauan Riau



Jika dilihat, informasi masih sangat minim, bahkan profil, pimpinan, dan lain sebagainya tidak bisa kita akses, kemudian ada web lain yang digunakan yaitu <https://ppid.kepriprov.go.id/informasipublik> namun juga sangat terbatas, untuk DPRD Provinsi Kepri tidak ditemui info apapun sebagai berikut:

Gambar 3
Website PPID Provinsi Kepri



Jika dilihat dari hasil observasi maka tidak ditemukan informasi apapun, maka untuk akses kebutuhan masyarakat dalam mencari informasi belum berjalan optimal, padahal dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi kepada pelayanan publik yang sebaik-baiknya.

5. Dampak (*impact*)

Berdasarkan hasil observasi maka dapat dianalisa bahwa dampak dari tercapainya kinerja sekretariat DPRD Provinsi Kepri adalah meningkatnya pelayanan kepada masyarakat, meningkatnya kinerja DPRD. Dalam hal membantu tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dilakukan oleh staf yang telah diperbantukan untuk menyelenggarakan fungsi administrasi, menyelenggarakan rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sekretariat Dewan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Hal ini dapat dilihat dari laporan kinerja sudah baik.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan yaitu Kinerja Instansi Pemerintahan Di Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau masih belum optimal, hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian berikut :

Untuk pegawai sekretariat selama ini sudah memahami tugas pokok dan fungsinya, Tugas Pokok dan Fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai rutin dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi. Di sekretariat DPRD tersebut sudah tersedia peralatan yang dapat membantu pekerjaan, pengaruh kemajuan teknologi informasi tidak dapat dihindarkan lagi, seperti penggunaan telepon, faksimili, komputer, dalam berbagai aktivitas.

Tidak hanya itu kegiatan yang dilakukan selama berjalan sesuai dengan tugas yang diberikan, dimana mulai dari urusan DPRD sampai dengan pelayanan kepada masyarakat sudah berjalan, seperti melayani dan menerima tamu DPRD, menyiapkan alat kelengkapan DPRD, menerima dan menyampaikan aspirasi masyarakat, menerima dan melayani masyarakat yang membutuhkan informasi.

Selama ini pihak sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau mengelola website



untuk memberikan keterbukaan informasi yang mudah di akses oleh masyarakat. Jika dilihat pada website, <https://dprd.kepriprov.go.id/> dimana jika dilihat harusnya informasi yang diberikan sudah bisa diperoleh oleh masyarakat karena sudah disajikan namun kenyataannya, isi dari website sangat terbatas, bahkan bagian informasi kosong, informasi masih sangat minim, bahkan profil, pimpinan, dan lain sebagainya tidak bisa kita akses, kemudian ada web lain yang digunakan yaitu <https://ppid.kepriprov.go.id/informasipublik> namun juga sangat terbatas, untuk DPRD Provinsi Kepri tidak ditemui info apapun.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. 2012. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Mulyadi. 2007. Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen. Jakarta: Salemba Empat.
- Mundung, R. M., Manossoh, H., & Kapojos, P. (2023). Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat DPRD Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 11(4), 527-537.
- Peraturan Presiden 29 Tahun 2014 tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah.
- PERMENPAN 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- Sembiring, Masana. 2012. Budaya & Kinerja Organisasi : Perspektif Organisasi Pemerintah. Bandung: Fokus Media.
- Susilatri, S., Tanjung, A. R., & Nugraheni, E. M. (2015). Pengaruh kompetensi aparatur pemerintah daerah, penerapan akuntabilitas keuangan, pemanfaatan teknologi informasi, dan ketaatan pada peraturan perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Doctoral dissertation, Riau University).
- Yuwono, Sony dkk. 2005. Penganggaran Sektor Publik. Malang: Bayumedia Publishing

